SOSIALISASI ANTI KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN PUNGLI UNTUK WUJUDKAN ASN DINAS SOSIAL BERINTEGRITAS

Palangka Raya, 22 Mei 2025. Dalam upaya memperkuat komitmen Dinas Sosial Kota Palangka Raya menuju Zona Integritas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, Anti Gratifikasi, dan Pungutan Liar, sekaligus Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan narasumber dari Inspektorat Kota Palangka Raya dan Bagian Organisasi.

Acara yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini dibuka oleh Inspektur Kota Palangka Raya, Ir. Hambali. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Kepala Bidang, dan seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Dalam sambutanya Kepala Dinas Sosial H. Riduan berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas ASN dalam melaksanakan layanan. Selanjutnya kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Kota Palangka Raya, Ir. Hambali, beliau menyampaikan apresiasi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya kolektif membangun sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Ir. Hambali menekankan bahwa integritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, seluruh ASN harus memahami dan menjalankan prinsip-prinsip anti korupsi, anti gratifikasi, dan bebas dari pungutan liar, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari etika profesi dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang bersih. Adanya Dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat diharapkan untuk mewujudkan Palangka Raya yang bebas korupsi dan birokrasi yang melayani.-(AK)